

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dalam upaya mengatasi persoalan *irregular migration*, terutama pengungsi yang berasal dari etnis Rohingya yang dimana sepakat untuk melarikan diri dan mengungsi ke negara lain karena mendapatkan perlakuan diskriminatif dari negara Myanmar maka terdapat beberapa upaya penyelesaian, yaitu :

1. Indonesia dan Australia merupakan negara yang paling sering melakukan kerjasama meskipun hubungan antar kedua negara tidak selalu berjalan dengan baik. Berbagai kerjasama antara Indonesia dan Australia telah banyak dilakukan salah satunya melakukan kerjasama untuk mengatasi permasalahan *irregular immigration*.
2. Indonesia dan Australia berinisiatif melakukan kerjasama dan berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penyelundupan dan perdagangan manusia dengan membuat suatu forum internasional bernama Bali Process yang terbentuk pada tahun 2002.
3. Bali Process mengadakan pertemuan-pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri oleh negara – negara anggota forum yang telah bergabung untuk menciptakan suatu kesepakatan atau penyelesaian masalah *irregular migration* salah satunya yang sedang dilakukan oleh para etnis Rohingya saat ini.
4. Kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam kerangka *Bali Process* telah menghasilkan beberapa kerja sama kemitraan yang setara dalam sebuah MOU. Sebagaimana yang telah disepakati dalam pertemuan *Bali Procces* di tahun 2002, kerja sama antara negara-negara asal, transit dan tujuan untuk menghentikan migrasi ilegal, isu penyelundupan manusia, perdagangan manusia dan kejahatan transnasional terkait telah dibahas bersama.
5. Bali Process kemudian menginisiasi adanya satu mekanisme konsultasi regional untuk merespons situasi darurat untuk mengatasi *irregular migration* yang dilakukan oleh etnis Rohingya. Yang dimana jika terjadi suatu kondisi darurat negara – negara tersebut sepakat akan melakukan konsultasi dan komunikasi yang akan dimulai dari *co-chairs* (Indonesia dan Australia). Apabila perlu ada pertemuan yang lebih luas maka kita akan meminta *steering committee* untuk bertemu dan

selanjutnya negara-negara yang terpengaruh .Namun mekanisme respons situasi darurat harus disertai langkah konkret. Perlu ada sebuah mekanisme yang jelas yang dimana menjelaskan posisi negara asal dari imigran tersebut, bagaimana posisi negara transit yang akan dilalui oleh imigran tersebut, bagaimana posisi negara penerima, serta bagaimana mekanisme untuk melakukan pertolongan ketika terjadinya suatu masalah. Bahkan ketika permasalahan terjadi di perairan internasional, harus menjelaskan siapa yang paling berhak untuk mengambil alih mengatasi permasalahan.